

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian Jepara 1677 merupakan titik awal dominasi VOC di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cirebon dan Priangan. Melalui perjanjian ini, Amangkurat II terpaksa menggadaikan wilayah tersebut kepada VOC untuk menstabilkan Mataram yang saat itu sedang dilanda konflik internal, terutama pemberontakan Trunajaya. Sejak resminya perjanjian 1677, VOC belum secara aktif mengendalikan wilayah ini, namun setelah tahun 1680-an, VOC mulai memusatkan perhatiannya pada Cirebon dan Priangan setelah menyadari potensi ekonomi yang besar di dalamnya.

Ketika terjadi perselisihan di antara ketiga penguasa Cirebon, VOC memanfaatkan celah tersebut untuk memperkuat pengaruhnya melalui perjanjian tahun 1681, yang menjadikan VOC sebagai protektorat di Cirebon. Setelah mengukuhkan posisi di Cirebon, VOC mulai memperluas pengaruhnya ke Priangan dengan menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Dalam prosesnya, VOC secara efektif menggunakan otoritas lokal di Cirebon dan Priangan sebagai perantara untuk mengelola wilayah serta mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di dalamnya. Kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan VOC menyebabkan kemunduran ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Sehingga eksploitasi tenaga kerja tanpa imbalan yang

sesuai dan kebijakan pencatatan penduduk serta penyerahan hasil bumi semakin memperkuat kedudukan VOC di Jawa Barat. Selain itu, keterlibatan VOC dalam suksesi kepemimpinan dan pengambilan keputusan internal memperkuat kontrol mereka atas pemerintahan lokal, sehingga menghilangkan otoritas tradisional para penguasa lokal.

Secara keseluruhan, dominasi VOC yang dimulai dengan perjanjian Jepara 1677 telah membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan ekonomi di Cirebon dan Priangan. Perubahan ini mencerminkan transisi ke arah sistem pemerintahan yang lebih terpusat di bawah kendali VOC, yang secara efektif menggantikan otoritas tradisional dan membuat wilayah tersebut semakin bergantung pada keputusan dan arahan dari VOC. Dampak berkelanjutan dari dominasi ini terlihat pada periode-periode berikutnya, setelah Cirebon dan Priangan sepenuhnya berada di bawah kendali VOC pada tahun 1705.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa karya ini tidaklah sempurna sehingga saran, masukan dan kritik sangat diperlukan. Selain itu, penulis berharap agar penelitian ini tidak hanya menjadi titik akhir, tetapi menjadi pijakan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperluas pemahaman tentang dampak perjanjian Jepara 1677 terhadap kehidupan masyarakat Cirebon dan Priangan, bahkan dalam konteks yang lebih luas.